

Membumikan Pluralisme dalam Pendidikan Islam: Analisis Pemikiran Abdurrahman Wahid

Dedi Syaputra

E-mail: dedisyaputraaa@gmail.com

Institut Agama Islam Yasni Bungo

Iber Marza

E-mail: ibermarza@iaiyasnibungo.ac.id

Institut Agama Islam Yasni Bungo

Abstract

Pluralism is an ideology that views reality as an entity composed of diverse substances, often used to describe social diversity and the principle of acceptance toward those differences. In the context of education, particularly Islamic education, pluralism becomes both a challenge and an opportunity. As a cultural broker, Islamic education faces the demand to adapt to the changing times without abandoning the universal principles of religion. Modern life requires a positive and creative intellectual response to change, while the pluralism of Indonesian society demands an inclusive and tolerant religious attitude. This research examines the thoughts of Abdurrahman Wahid through the paradigm of contextualizing classical thought, which combines universal Islamic values with the diverse social realities. The results of the analysis show that Abdurrahman Wahid not only articulates pluralism at the conceptual level, but also implementing it in a real way in his role as a cultural figure, religious leader, and politician. His ability to preserve while enjoying diversity serves as a model for the development of adaptive, inclusive, and contextual Islamic education in Indonesia.

Keywords: Pluralism, Islamic Education, Inclusiveness, Abdurrahman Wahid

Abstrak

Pluralisme merupakan suatu paham yang memandang realitas sebagai entitas yang terdiri dari beragam substansi, serta kerap digunakan untuk menggambarkan keragaman sosial dan prinsip penerimaan terhadap perbedaan tersebut. Dalam konteks pendidikan, khususnya pendidikan Islam, pluralisme menjadi tantangan sekaligus peluang. Sebagai agen perubahan kebudayaan (*cultural broker*), pendidikan Islam dihadapkan pada tuntutan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa melepaskan prinsip-prinsip universal agama. Kehidupan modern menuntut

respons intelektual yang positif dan kreatif terhadap perubahan, sementara pluralitas masyarakat Indonesia menuntut sikap keberagaman yang inklusif dan toleran. Penelitian ini mengkaji pemikiran Abdurrahman Wahid melalui paradigma kontekstualisasi pemikiran klasik, yang memadukan nilai-nilai universal Islam dengan realitas sosial yang majemuk. Hasil analisis menunjukkan bahwa Abdurrahman Wahid tidak hanya mengartikulasikan pluralisme dalam tataran konseptual, tetapi juga mengimplementasikannya secara nyata dalam peranannya sebagai tokoh budaya, agamawan, dan politikus. Kemampuannya dalam memelihara sekaligus menikmati keragaman menjadi teladan bagi pengembangan pendidikan Islam yang adaptif, inklusif, dan kontekstual di Indonesia

Kata Kunci: Pluralisme, Pendidikan Islam, Inklusivitas, Abdurrahman Wahid

Pendahuluan

Pembenahan terhadap pendidikan Islam adalah suatu keharusan. Dalam beberapa dekade pendidikan hanya merupakan upaya pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan. Hal ini terlihat ketika Soeharto berkuasa dengan paradigma otoriter, diskursif dan dominatif dalam berbagai segi kehidupan bernegara dan berbangsa. Berbagai perbedaan pandangan ditekan dan dikikis dan terkadang dianggap melawan pemerintah, sementara Islam sendiri sebenarnya menentang status quo yang tidak membawa perbaikan. Runtuhnya rezim orde baru memberikan angin segar bagi alam demokrasi di Indonesia. Kebebasan yang sekian lama berada di balik tirai besi akhirnya lepas juga, namun kebebasan bukan berarti bebas tanpa aturan dan norma. Berbagai macam kerusakan dan tindakan main hakim sendiri dengan dibungkus “kertas” persoalan sosial ekonomi, politik dengan nuansa suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang cukup kental di berbagai belahan Indonesia misal: kerusakan Poso, kerusakan Sampit dan lainnya. Perbedaan pandangan, suku, ras dan agama kadang dijadikan alasan untuk pembelaan diri. Fenomena ini sangat disayangkan dan menandakan bahwa masyarakat telah kehilangan jati dirinya sebagai manusia yang berkemanusiaan dan berbudi. Penghormatan atas keberagaman belum dijunjung tinggi.

Pendidikan merupakan agen perubahan kebudayaan (*cultural broker*) bagi masyarakat sekitar, mau atau tidak pendidikan Islam harus melakukan pembenahan. Hal ini merupakan tugas berat, di satu sisi kehidupan modern menuntut kemampuan intelektual untuk

merespon secara positif dan kreatif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi tanpa harus melepaskan diri dari substansi dan prinsip-prinsip universal agama. Pluralitas masyarakat Indonesia, di sisi lain, juga menuntut sikap keberagamaan yang inklusif dan toleran. Dengan menggunakan paradigma kontekstualisasi pemikiran klasik, sikap-sikap itu –yaitu respon positif dan kreatif terhadap perubahan dan sikap keberagamaan yang inklusif dan toleran- bisa diekspresikan secara nyata oleh Abdurrahman Wahid. Ia merupakan seorang tokoh budaya, agama, serta politikus yang mampu mempeluangi keragaman sekaligus seorang manusia yang mampu “menikmati” keragaman itu. Abdurrahman Wahid lahir 7 september 1940 di Jombang, Jawa Timur, dengan nama Abdurrahman Wahid ad-Dakhil. Ia tumbuh dan berkembang di kalangan keluarga santri. Kakeknya, KH. Hasyim Asy’ari adalah pendiri NU. Ayah beliau adalah seorang yang pernah menjadi menteri agama pertama RI yaitu KH. A. Wahid Hasyim. Abdurrahman Wahid merupakan tokoh agama, budaya serta tokoh perdamaian, ini terbukti ketika ia menjabat Presiden WCRP (*World Council for Religion and Peace*). Tahun 1984 Ia terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum PBNU dan pada tahun 1999 terpilih menjadi Presiden RI. Abdurrahman Wahid salah satu tokoh yang peduli akan tegaknya pluralisme masyarakat bukan hanya terletak pada suatu pola hidup berdampingan secara damai, karena hal ini masih sangat rentan terhadap munculnya kesalahpahaman antar kelompok masyarakat yang pada saat tertentu bisa menimbulkan disintegrasi. Lebih dari itu, penghargaan terhadap pluralisme berarti adanya kesadaran untuk saling mengenal dan berdialog secara tulus sehingga kelompok yang satu dengan yang lain memberi dan menerima (*take and give*) serta bagaimana Islam memandang Islam, *ummah*, *jama’ah*, *ra’iyah*, *imamah*, *ukhuwah* dan seterusnya.

Ketidakpastian moral dan spiritual serta masih meluasnya sikap memandang segala sesuatu dari satu sudut pandang, dan itu pun umumnya berdasarkan kepentingan masing-masing. Harus ada kerendahan hati (*humility*) bahwa keunggulan komparatif yang dimiliki ajaran Islam hanya berguna apabila digunakan untuk kepentingan keseluruhan umat manusia, bukan hanya untuk kepentingan umat

Islam itu sendiri. Belum berkembang wawasan keagamaan yang mengolah ajaran agamanya secara utuh, sehingga yang dicapai hanyalah “pendalaman” wawasan keagamaan yang bersifat parsial: “keagungan” agama melalui kuantitatif. Kalaupun diberlakukan ukuran kualitatif, hanyalah dalam dimensi normatif, seperti ketakutan akan dekadensi moral para remaja, erosi ukhuwah (persaudaraan) di kalangan sesama muslim. Kebenaran teologis serba mutlak dari ulama dijadikan satu-satunya acuan, dengan melupakan kebenaran nisbi dari semua agama dalam pandangan sejarah sebagai tolok ukuran universal.

Menurut Abdurrahman Wahid kelemahan “pendidikan alternatif” yang ditawarkan oleh Paulo Friere masih bersifat politis dalam konteks konfrontatif terhadap kekuasaan sehingga berkecenderungan memberontak kepada kekuasaan yang ada dan dengan sendirinya akan membawa kepada “pukulan balasan” dari kekuasaan itu dan ini tidak sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang tidak mudah menerima paradigma “pertentangan kelas” atau “atas bawah”. Sedangkan prof. Dr. Ahmad Syafi’i Ma’arif sebagai tokoh Muhammadiyah juga mengatakan bahwa Paulo Friere hanya mampu menjawab *freedom from what?* akan tetapi belum bisa menjawab *freedom for what?* padahal ini sangat penting bagi orang yang beragama, karena kita tidak hanya terikat oleh kepentingan dunia akan tetapi juga mempunyai keterikatan yang organik dengan dimensi *spiritual transendental* yang memungkinkan manusia berdialog secara intens dengan yang Tidak terhingga dan pendidikan Islam merupakan alternatif.¹ Abdurrahman Wahid mencoba tidak hanya menggunakan hasil pemikiran Islam tradisional namun lebih pada penggunaan metodologi teori hukum (*ushul al-fiqh*) dan kaidah-kaidah hukum (*qawaid fiqhiah*) serta pemikiran kesarjanaan Barat dalam kerangka pembuatan suatu sintesis untuk melahirkan gagasan baru sebagai

¹ Ahmad Syafii Ma’arif, “Pendidikan Islam sebagai Paradigma Pembebasan”, Muslih Usa (ed.), *Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991) hlm. 17-25

upaya menjawab perubahan-perubahan aktual.² Seperti ditegaskan Nurcholish Madjid suatu generasi tidak bisa secara total memulai upaya pembaharuan dari nol, melainkan mesti bersedia bertaqlid, yang berarti melakukan dan memanfaatkan proses akumulasi pemikiran-pemikiran masa lalu.³ Namun, warisan-warisan masa lalu tidak sekedar dihargai, tetapi sekaligus harus dihadapi secara kritis agar lahir pemikiran-pemikiran kreatif. Tanpa adanya penghargaan terhadap warisan keilmuan klasik maka proses pemiskinan kultural akan terjadi.

Suatu keharusan bagi umat Islam jika dididik untuk mengenal dinamika sosial, kultural, politik, perokonomian, dan dinamika edukasinya sendiri. Mereka harus dididik untuk bisa mendialogkan kemaslahatan umat dan hak demokratisasinya serta diberi kesempatan dengan menghilangkan kesan didekte. Abdurrahman Wahid mengatakan: bahwa sejarah sepenuhnya menunjukkan bahwa kebesaran Islam bukan karena ideologi atau politik tapi justru melalui tasawuf, perdagangan, dan pengajaran. Jadi antar tingkat kualitas pendidikan dan ukhuwah Islamiah dapat menjadi umpan balik.⁴ Kalau tingkat pendidikan seseorang tinggi atau cara berpikirnya demokratis, tidak mudah menghakimi dan mampu menempatkan perbedaan pendapat sebagai kawan berpikir, maka umat Islam yang demikian akan semakin banyak memperoleh nilai tambah dalam hidupnya dan sejumlah alternatif untuk menemukan kebenaran dan memecahkan berbagai problem sosial krusial.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada pengkajian konsep pluralisme, pendidikan Islam, dan pemikiran Abdurrahman Wahid yang

² Umaruddin Masdar, *Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 123

³ *Ibid.*

⁴ Abdurrahman Wahid, *Islam di Tengah Pergulatan Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), hlm.133

bersumber dari karya-karya tertulis, baik primer maupun sekunder. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menelaah secara mendalam pandangan tokoh, kerangka teoretis, dan interpretasi terhadap konsep pluralisme dalam konteks keberagamaan dan pendidikan di Indonesia. Sumber data primer penelitian ini adalah karya-karya Abdurrahman Wahid, baik dalam bentuk buku, artikel, pidato, maupun wawancara yang telah terdokumentasi. Data sekunder diperoleh dari literatur yang membahas pluralisme, pendidikan Islam, teori kontekstualisasi pemikiran klasik, serta kajian akademik tentang kontribusi Abdurrahman Wahid di bidang budaya, agama, dan politik.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen di perpustakaan, arsip digital, jurnal ilmiah, dan sumber daring yang kredibel. Proses analisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan langkah-langkah; Pertama; Mengidentifikasi konsep-konsep kunci dalam teks terkait pluralisme, pendidikan Islam, dan sikap keberagamaan inklusif-toleran. Kedua; Mengkategorikan temuan sesuai tema besar penelitian. Ketiga; Menginterpretasikan makna data dengan mengaitkan konteks sosial, budaya, dan historis pemikiran Abdurrahman Wahid. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan pandangan Abdurrahman Wahid dari karya-karya pribadinya dengan analisis atau penilaian para peneliti lain. Selain itu, seluruh proses penelitian memperhatikan kaidah etika ilmiah, termasuk penyebutan sumber secara akurat dan penghindaran plagiarisme.

Pembahasan

A. Paradigma Pemikiran Gusdur

Siapa yang tidak kenal dengan Gus Dur?. Sosok yang unik penuh ide kontroversial, dengan metode zig zag yang membuat kebanyakan orang bingung dan kelabakan. Idenya tidak dapat dicerna dengan menggunakan satu sudut pandang saja. Semua ide dan manuvernya butuh interpretasi, bahkan secara ekstrim dianalogikan sebagai

“kitab”⁵ yang butuh penafsiran. Seperti yang dikatakan Cak Nur (Nurcholish Madjid) yang kenal Gus Dur sejak masih menjadi mahasiswa -kebetulan keduanya berasal dari Jombang- sejak muda Gus Dur adalah orang nekad. Ia selalu keluar dari batas kemampuannya dan tidak pernah puas dengan jalan yang pasti dan aman.⁶ Jangankan kita, tokoh sekaliber Nur Cholish Madjid atau Azyumardi Azra pun merasa terengah-engah dan kesulitan memahami sepak terjangnya, mulai dari sikap, tindakan, ucapan dan pendapatnya baik mengenai politik, budaya, keagamaan atau respon terhadap realitas yang ada sehingga Cak Nur menyebut Gus Dur sebagai rahasia Tuhan yang ke empat setelah jodoh, kematian dan rizki. Bahkan Azyumardi Azra yang menyebut sebagai salah satu dari delapan keajaiban Tuhan.⁷

Untuk dapat memahami pemikiran Gus Dur Greg Barton lebih cenderung melihat pada keyakinan religius dan kehidupan batiniahnya⁸ bukan berarti mengenyampingkan kehidupannya secara makro. Latar belakang pondok pesantren -penuh nilai-nilai Cultural- di mana ia mulai tumbuh dan berkembang juga mempengaruhi pemikirannya. Dalam konteks ini Abdurrahman Wahid tidak sekedar menggunakan produk-produk pemikiran Islam tradisonal sebagai hasil final tetapi lebih menekankan pada penggunaan metodologi dalam kerangka pembuatan sintesis untuk melahirkan gagasan baru sebagai upaya menjawab problem sosial aktual. Di samping kehidupan pesantren, ia juga diperkenalkan dengan kelompok-kelompok sosial yang lebih luas. Pendidikan dunia Timur Tengah yang kosmopolitan – terutama di Bagdaq yang bercorak sekuler dan liberal- secara langsung ikut mewarnai corak pemikirannya. Meskipun secara formal ia tidak belajar di Barat, tetapi sejak muda ia terbiasa dengan pemikiran-pemikiran barat. Oleh karena itu ia lebih siap bergaul dengan wacana-wacana besar pemikiran barat dan keislaman, dan bahkan kedua

⁵ Lihat *Gus Dur dalam Sorotan Cendikiawan Muhammadiyah* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 61

⁶ Greg Barton, “Memahami...”, hlm. xxxvii

⁷ *Gus Dur dalam Sorotan...*, hlm. 61

⁸ Greg Barton, “Memahami...”, hlm. xxv

sumber tersebut (Islam dan Barat) dikombinasikan secara kritis-dialektis sebagai basis yang kemudian membentuk pemikirannya.⁹ Selain itu, ia juga aktif dalam berbagai LSM dan mudah bergaul dengan komunitas heterogen dari berbagai karakter budaya, etnis, dan agama dengan ideologi yang berbeda-beda –dari yang konservatif, fundamental, liberal, sampai pada level sekuler sekalipun.¹⁰

Hal ini secara signifikan mempengaruhi pola pikir dalam melihat realita. Sedangkan AS Hikam, seorang peneliti LIPI mengemukakan pola pemikiran Gus Dur pada dasarnya dapat dipahami sebagai produk dari tiga kepedulian ulama: pertama, rivitalisasi warisan Islam tradisonal *ahlussunnah wal jama'ah* yang komitmen atas kemanusiaan (*insaniyah*), antara lain adanya kepedulian yang kuat pada kerukunan sosial (*social harmony*) dan sikap inklusif yang ada dalam ajaran Islam. Kedua, wacana modenitas yang didominasi pemikiran sekuler Barat dan semangat pencerahan (*enlightenment*). Gus Dur tetap mengacu pada paham *ahlussunnah wal jama'ah* untuk menyikapi perkembangan modern dengan sikap terbuka dan kritis untuk mencari titik temu antara keduanya. Modernitas tidak disikapi dengan kronfontatif tidak seperti apa yang dilakukan banyak cendikiawan Islam, tetapi secara akomodatif guna menemukan titik temu yang bermanfaat memecahkan masalah umat, tanpa harus meninggalkan Islam tradisional. Ketiga, Gus Dur selalu berusaha pencarian jawaban atas tantangan yang dihadapi umat Islam bangsa Indonesia di tengah perubahan yang amat cepat dari proses globaliasi dan modernisasi.¹¹ Greg Barton, Fachry Ali dan Bachtiar Effendi memasukkan Abdurrahman Wahid sebagai *Neo-modernis*¹² Islam.¹³ Barton

⁹ Laode Ida dan A. Thantowi Jauhari, *Gus Dur di antara Keberhasilan dan Kenestapaan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1999), hlm. 70

¹⁰ Greg Barton, "Memahami...", hlm. xxv

¹¹ Laode Ida dan A. Thantowi Jauhari, *Gus Dur...*, hlm. 77-78

¹² Merupakan gerakan pemikiran progresif yang mempunyai sikap positif terhadap modernitas, perubahan dan pembangunan. Bahkan aliran ini kritis terhadap dampak modernitas dan tidak melihat Barat sebagai ancaman bagi dunia Islam namun antara keduanya saling mengisi. Neo- modernis juga mengedepankan sikap inklklusif, toleran dan liberal serta selalu melakukan kontekstualisasi ajaran Islam. Lihat dalam

menemukan tema yang dominan dalam pemikiran Gus Dur yaitu tema humanitarianisme liberal.¹⁴ Tema liberal secara fundamental mendapat tempat yang besar dalam pemikiran Islam Abdurrahman Wahid tanpa harus meninggalkan prinsip Islam tradisional¹⁵ tetapi mensintesa keduanya.

B. Konsep Pemikiran Pluralisme Abdurrahman Wahid

Masyarakat Indonesia yang plural, dengan ragam budaya, suku, etnis dan agama serta ideologi merupakan kekayaan tersendiri. Oleh karena itu, keragaman agama, etnis, ideologi ataupun budaya membutuhkan sikap arif dan kedewasaan berpikir dari berbagai lapisan masyarakat, tanpa memandang agama, warna kulit, status sosial dan etnis. Tanpa ada sikap saling curiga dan berprasangka buruk terhadap kelompok lain, kita sebagai bangsa sudah terlanjur majemuk dan konsekuensinya adalah adanya penghormatan atas pluralitas masyarakat itu. Abdurrahman Wahid mengatakan demi tegaknya pluralisme masyarakat bukan hanya terletak pada suatu pola hidup berdampingan secara damai, karena hal itu masih rentan terhadap munculnya kesalahpahaman antar-kelompok masyarakat yang pada saat tertentu bisa menimbulkan disintegrasi.¹⁶

Namun harus ada penghargaan yang tinggi terhadap pluralisme itu, yaitu adanya kesadaran untuk saling mengenal dan berdialog secara tulus sehingga kelompok yang satu dengan yang lain saling *take and give*.¹⁷ Latar belakang paham keislaman tradisional –*faham*

Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 121-122

¹⁵ *Ibid.*

¹⁴ Greg Barton, “Memahami...”, hlm. xxx

¹⁵ Doktrin *ahlusunnah wal jama’ah*: *tawwatsuh* (moderat), *tasamuh* (toleransi), dan *i’tidal* (adil) dalam berinteraksi dengan orang lain. Gus Dur lebih menekankan pada penggunaan metodologi (*manhaj*), teori hukum (*ushul al fiqh*) dan kaidah-kaidah hukum (*qowaid fiqhiyyah*) dalam kerangka pembuatan sintesis untuk menelorkan gagasan baru sebagai upaya menjawab perubahan-perubahan aktual.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 145

¹⁷ Abdurrahman Wahid, “Pluralisme Agama dan Masa Depan Indonesia”, makalah pada seminar agama dan masyarakat, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 20-November 1992. Umaruddin Masdar. *Membaca Pemikiran...*, hlm. 145

ahlussunnah wal jama'ah- serta pemikirannya yang liberal, Islam menurut Abdurrahman Wahid harus tampil sebagai pemersatu bangsa dan pelindung keragaman dan mampu menjawab tantangan modernitas sehingga Islam lebih inklusif, toleran, egaliter dan demokratis. Nilai Islam yang universal dan esensial lebih diutamakan dari pada legal-simbolis, Islam mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa membawa “embel-embel”¹⁸ Islam akan tetapi ruh keislaman menyatu dalam wajah nasionalisme, lebih lanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pribumi Islam

Proses pertumbuhan Islam -sejak nabi Muhammad, sahabat, para ulama- tidak serta merta menolak semua tradisi pra-Islam (dalam hal ini budaya masyarakat arab pra-Islam). Tidak seluruh sistem lokal ditolak Islam, tradisi dan adat setempat yang tidak bertentangan secara diametral dengan Islam dapat diinternalisasikan menjadi ciri khas dari fenomena Islam di tempat tertentu.¹⁹ Demikian juga proses pertumbuhan Islam di Indonesia tidak dapat lepas dari budaya dan tradisi masyarakat. Agama dan budaya bagiakan uang logam yang tidak bisa dipisahkan. “Islam” bersumberkan wahyu yang bersifat normatif, maka cenderung menjadi permanen. Sedangkan budaya merupakan ciptaan manusia, oleh sebab itu perkembangannya mengikuti zaman dan cenderung untuk selalu berubah. Perbedaan ini tidak menghalangi kemungkinan manifestasi kehidupan beragama dalam bentuk budaya.²⁰ Lebih lanjut Ia (Gus Dur) mengatakan: “Tumpang tindih antara agama dan budaya akan terjadi terus-menerus sebagai suatu proses yang akan memperkaya kehidupan dan membuatnya tidak gersang”.

¹⁸ Islamisasi bukan proses Arabisasi tetapi Islamisasi lebih mengutamakan pada manifestasinya nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Selama ini proses Islamisasi belum dipahami betul oleh sebagian besar kaum muslim, hal ini terlihat misalnya: kata “saudara” tidak perlu diganti “ikhwan”, “langgar” diganti “mushola”, “sembahyang” diubah menjadi “shalat”. Hal ini terlihat bahwa proses Islamisasi baru pada visualisasi: ketidak-pedean umat Islam.

¹⁹ Umaruddin Masdar, *Membaca Pemikiran...*, hlm. 141

²⁰ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan* (Depok: Desantara, 2001), hlm. 117

Kekayaan variasi budaya memungkinkan adanya persambungan antar berbagai kelompok atas dasar persamaan. Upaya rekonsiliasi antara budaya dan agama bukan karena kekhawatiran terjadinya ketegangan antara keduanya, sebab kalau manusia dibiarkan pada fitroh rasionalnya, ketegangan seperti itu akan reda dengan sendirinya. Sebagai contoh redanya semangat Ulama dalam mempersoalkan rambut gondrong.²¹ Pribumisasi²² Islam dalam segi kehidupan bangsa merupakan suatu ide yang perlu dicermati. Selanjutnya, Gus Dur mengatakan bahwa pribumisasi bukan merupakan suatu upaya menghindarkan timbulnya perlawanan dari kekuatan-kekuatan budaya setempat, akan tetapi justru agar budaya itu tidak hilang. Inti dari pribumisasi Islam adalah kebutuhan untuk menghindari polarisasi antara agama dengan budaya, sebab polarisasi demikian memang tidak terhindarkan.²³ Gagasan Abdurrahman Wahid ini tampak ingin memperlihatkan Islam sebagai sebuah agama yang apresiatif terhadap konteks-konteks lokal dengan tetap menjaga pada realitas pluralisme kebudayaan yang ada. Abdurrahman Wahid dengan tegas menolak “satu Islam” dalam ekspresi kebudayaan misalnya semua simbol atau identitas harus menggunakan ekspresi kebudayaan Arab. Penyeragaman yang terjadi bukan hanya akan mematikan kreativitas kebudayaan umat tetapi juga membuat Islam teralienasi dari arus utama kebudayaan nasional. Bahaya dari proses arabisasi adalah tercerabutnya kita dari akar budaya kita sendiri.²⁴

“Kemampuan orang Islam untuk memahami masalah-masalah dasar yang dihadapi bangsa, dan bukan berusaha memaksakan agendanya sendiri. Kalau ini terjadi, maka yang berlangsung sebenarnya hanyalah proses pelarian (*eskapisme*). Umat Islam terlalu menuntut syarat-syarat yang terlalu idealistik untuk menjadi muslim

²¹ *Ibid.*, hlm 118.

²² Pribumisasi Islam bukanlah “*Jawanisasi*”, sebab Pribumisasi Islam hanya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal dalam merumuskan hukum-hukum agama, tanpa mengubah hukum itu sendiri. Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara...*, hlm. 119

²³ *Ibid.*

²⁴ Umaruddin Masdar, *Membaca Pemikiran...*, hlm. 140

yang baik. “kecenderungan formalisasi ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat dan Islamisasi dalam bentuk manifestasi simbolik ini jelas tidak menguntungkan karena hanya menimbulkan kekeringan substitusi”.²⁵

Bahkan Gus Dur menolak adanya pencampuradukkan kebudayaan baik oleh kalangan agama maupun kalangan birokrasi karena kebudayaan sangat luas cakupannya yaitu kehidupan sosial manusia (*human social life*) itu sendiri. Birokratisasi²⁶ kebudayaan yang dilakukan akan menimbulkan kemandekan kreatifitas suatu bangsa. Kebudayaan sebuah bangsa pada hakekatnya adalah kenyataan *pluralistic*, pola kehidupan yang diseragamkan atau dengan kata lain sentralisasi adalah sesuatu yang sebenarnya tidak berbudaya. Pertanyaan sekarang mampukah Islam tetap eksis dalam zaman yang serba modern atautkah Islam tengelam dalam mimpi atas kejayaan para pemikir terdahulu? Sebagai pemeluk agama yang baik dalam lingkup wawasan kebangsaan, menurut Abdurrahman Wahid yaitu: selalu mengutamakan pencarian cara-cara yang mampu menjawab tantangan zaman dan lokalitas kehidupan tanpa meninggalkan inti ajaran agama. Selalu ada upaya untuk melakukan reaktualisasi ajaran agama dalam situasi kehidupan yang konkrit, tidak hanya dicukupkan dengan visualisasi yang abstrak belaka. Dalam bahasa lain agama berfungsi sebagai wahana pengayom tradisi bangsa, sedangkan pada saat yang sama agama menjadikan kehidupan berbangsa sebagai wahana pematangan dirinya.²⁷

Benar apa yang dikatakan Greg Barton bahwa: Abdurrahman Wahid merupakan seorang tokoh yang cinta terhadap budaya Islam tradisional (dalam hal ini khazanah pemikiran Islam yang dihasilkan oleh ulama-ulama terdahulu). Namun kecintaan ini bukan berarti

²⁵ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara...*, hlm. 130

²⁶ Kongres kebudayaan yang diprakarsasi oleh departemen pendidikan dan kebudayaan menunjukan adanya campur tangan birokrasi pemerintah terhadap originalitas kebudayaan itu sendiri. Budaya sebagai hasil kreatifitas pemikiran manusia sebaiknya dibiarkan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara...*, hlm. 5-9

²⁷ *Ibid.*, hlm. 4

keterlibatan dan penerimaan segala aspek budaya tradisional karena Abdurrahman sangat kritis terhadap budaya tradisional.²⁸ Pribumisasi Islam merupakan upaya dakwah (pola *amar ma'ruf nahi mungkar* diselaraskan dengan konsep *mabadi khoiro ummah*). Pelaksanaan kongkritnya adalah menasionalisasikan perjuangan Islam, dengan harapan tak ada lagi kesenjangan antara kepentingan nasional dengan kepentingan Islam.²⁹ Islam sebagai agama yang diakui di Indonesia selain agama-agama yang lain diaktualisasikan sebagai inspirasi spiritual bagi tingkah laku kehidupan seorang atau kelompok dalam bermasyarakat dan bernegara. Yang dibutuhkan umat Islam Indonesia adalah menyatukan "*aspirasi Islam*" menjadi "*aspirasi nasional*".³⁰ "Salah satu wajah ketegangan adalah upaya untuk menundukkan kebudayaan kepada agama melalui proses pemberian legitimasi. Legitimasi diberikan bukan sebagai alat penguat, tetapi sebagai alat pengerim. Proses ini berfungsi melakukan penyaringan terhadap hal-hal yang dipandang sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan agama."³¹

Islam yang merupakan agama³² *rahmatan lil alamin* haruslah senantiasa memberikan kontribusi dalam menjawab masalah yang timbul akibat proses modernisasi. Mengapa demikian? Karena ajaran agama mempunyai peran yang penting dalam berbagai segi kehidupan pemeluknya. Dalam hal ini agama dijadikan tempat mencari jawaban atas problem-problem kehidupan para pemeluknya, oleh karenanya

²⁸ Greg Barton, "Memahami Abdurrahman Wahid", dalam pengantar *Prisma Pemikiran Gus Dur* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm xxxvi.

²⁹ Zainal Arifin Thoha, *Kenyelenehan Gus Dur Gugatan Kaum Muda NU dan Tantangan Kebudayaan*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 205-206

³⁰ *Ibid.* hlm. 207

³¹ Abdurrahman Wahid. *Pergulatan Negara...*, hlm. 85

³² Agama hanya berfungsi suplementer dan hanya menyediakan sarana bagi proses perubahan sosial, bukan agama yang membuat perubahan itu. Dunia berkembang menurut menurut pertimbangan dunia itu sendiri. Agama hanya mempengaruhi sejauh dunia itu siap dipengaruhi, tidak lebih dari itu. Begitu agama mengubah dirinya menjadi penentu, tidaklah hanya mempengaruhi tetapi menentukan, maka dia (agama) telah menjadi duniawi. Kalau hal ini yang terjadi pada gilirannya ia bisa mengundang sikap represif (agama berusaha mempertahankan dirinya). Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 167.

tokoh agama mempunyai peran kunci dalam merumuskan kembali hukum Islam yang lebih memperhatikan umat Islam dan non muslim dengan mempertimbangkan realita (pluralitas masyarakat dan proses modernisasi serta pengaruh globalisasi). Selama ini hukum Islam hanyalah dijadikan “pos pertahanan” untuk mempertahankan identitas keislaman dari pengaruh proses sekularisasi. Kecendrungan statis ini menunjukkan ketidakmampuan hukum Islam dalam menjawab perubahan zaman yang aktual. Padahal hukum Islam memiliki peran besar dalam kehidupan masyarakat.³³

2. Nilai Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Demokrasi merupakan salah satu tema besar yang perlu digaris bawahi dari perjuangan dan pemikiran Abdurrahman Wahid. Baginya konsep demokrasi adalah konsekuensi logis yang dianggapnya sebagai salah satu dimensi dalam ajaran Islam. Alasan Gus Dur mengapa Islam dikatakan agama demokrasi. Pertama, Islam adalah agama hukum, dengan pengertian agama Islam berlaku bagi semua orang tanpa memandang kelas. Kedua, Islam memiliki asas permusyawaratan (*amruhum syuraa bainahum*), artinya adanya tradisi bersama membahas dan mengajukan pemikiran secara terbuka dan pada akhirnya diakhiri dengan kesepakatan. Ketiga, Islam selalu berpandangan memperbaiki kehidupan.³⁴ Ide demokratisasi Abdurrahman Wahid muncul karena ia melihat ada kecenderungan umat Islam Indonesia menjadikan Islam sebagai “alternatif” bukannya sebagai “inspirasi” bagi kehidupan masyarakat. Di sinilah letak permasalahannya, Islam tidak bisa menyatakan sumbangannya lebih besar dan benar dari yang lainnya karena semua pihak sama. Adanya penghargaan terhadap pluralitas dengan menganggap mereka yang berada di luar sebagai orang mandiri.³⁵

Meskipun banyak orang mengatakan bahwa ia adalah seorang yang *inkonsistensi*: sering membuat manuver dan ide-ide yang membingungkan dan dianggap menyesatkan umatnya. Namun

³³ *Ibid.*, hlm. 38

³⁴ Abdurrahman Wahid, *Membangun Demokrasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 85

³⁵ Abdurrahman Wahid, *Prisma...*, hlm. 199

justeru keinginannya menampilkan nilai-nilai Islam dalam segi kehidupan masyarakat Indonesia yang plural menunjukkan ia sangat konsisten. Hal ini terlihat dari perjuangan dan komitmennya dalam menyuarakan demokrasi, penegakan hak asasi manusia (pembelaan terhadap kaum minoritas, termasuk pembelaan terhadap perempuan) serta keadilan bagi setiap warga tanpa membedakan identitas serta latar belakang ideologi. Lebih lanjut, dalam rangka pembelaannya terhadap demokrasi dilakukan, ia tidak harus masuk dalam sistem tetapi di manapun dan kapanpun usaha pembelaan terhadap demokrasi dan keadilan terus dilakukakan. Ia secara tegas menolak bergabung dengan ICM ³⁶ dan memelopori berdirinya forum demokrasi (FORDEM)³⁷ sekaligus menjadi ketua Fordem. Ia sosok yang tak mau menyerah dan terkesan bandel, meskipun keberadaannya di fordem mendapatkan kritikan tajam kiai senior NU dan para cendekiawan muslim. Nurcholis Majid³⁸ mengatakan: "...kalau Gus Dur tidak masuk ICMI maka Gus Dur akan kehilangan basis intelektualnya." Gus Dur segera menjawab, "sejak kapan ICMI menjadi basis intelektual saya, basis intelektual saya itu di pesantren, kiai pondokan, sekali lagi bukan ICMI."

Pembelaan terhadap minoritas mendapatkan perhatian yang serius dari Gus Dur. Undang-undang menjamin akan perlakuan yang sama terhadap warga masyarakat untuk: berpendapat, keamanan, memilih agama dan pindah agama dan seterusnya. Muslim yang mayoritas harus dapat melindungi mereka yang minoritas. "...merupakan pengingkaran hakekat demokrasi yang ingin kita tegakkan di negeri ini, karena akan menjadikan mereka yang tidak

³⁶ ICMI yang merupakan organisasi buatan pemerintah yang kebijakannya banyak dimonopoli oleh pemerintahan Soeharto ketika itu.

³⁷ Fordem sebagian besar beranggotakan orang-orang non-muslim, sehingga kedekatan Gus Dur dengan orang non-muslim banyak dicurigai oleh tokoh Islam sendiri. Ia dikatakan agen zionis, membela non muslim dan dianggap menghancurkan Islam. Jawaban yang dikemukakan Gus Dur menjawab tuduhan itu sangat sederhana: saya justru berpegang pada al Qur'an dan Hadits Nabi bahwa, al Qur'an menekankan pentingnya perlindungan pada kelompok-kelompok minoritas, termasuk orang Kristen dan Konghucu. Lihat Abdurrahman Wahid, *Membangun...*, hlm. 28

³⁸ Listiono Santoso, *Teologi Politik Gus Dur*, (Yogyakarta: Ar Ruuz, 2004), hlm. 72.

memeluk agama mayoritas menjadi warga negara kelas dua. Dalam keadaan demikian, persamaan kedudukan semua warga negara di muka undang-undang tidak tercapai.”³⁹ Dalam konteks ke-Indonesian yang pluralistik hendaknya Islam tidak ditempatkan sebagai ideologi alternatif seperti memposisikan syari’ah berhadapan dengan kedaulatan rakyat. Kontribusi Islam dalam demokrasi bisa dicapai bila dari Islam ditarik sejumlah prinsip universalnya seperti persamaan, keadilan, musyawarah, kebebasan dan *rule of law*, karena dalam satu aspeknya adalah merupakan agama hukum. Pemikiran demokrasi Abdurrahman Wahid menunjukkan ia telah menerima konsep demokrasi liberal atau parlementer dan secara tegas menolak pemikiran atau “kedaulatan Tuhan” atau pemikiran yang berusaha mengawinkan kedaulatan Tuhan dengan kedaulatan rakyat, seperti yang dirumuskan oleh Dhiya’ ad-Din Rais.⁴⁰ “Saya bersedia memakai yang manapun asal benar dan cocok dengan hati nurani. Saya tidak memedulikan kutipan dari injil, Bhagawad Gita kalau benar kita terima.

Dalam masalah Bangsa ayat-ayat al Qur’an kita pakai secara fungsional bukannya untuk diyakini secara teologis. Keyakinan teologis dipakai dalam persoalan mendasar. Tetapi aplikasi, soal penafsiran. Berbicara penafsiran berarti bukan lagi masalah teologis tetapi sudah pemikiran.”⁴¹ Kedaulatan ada di tangan rakyat, ini merupakan kata kunci dari “demokrasi”. Rakyat yang menentukan arah dan haluan negara menuju masa depan dalam kehidupan yang adil dan beradab demi kesejahteraan bangsa dan negara. Mereka akan menentukan masa depan bangsa ini. Yang jelas rakyat menginginkan keadilan, kesejahteraan hidup lahir maupun batin, baik secara material maupun spiritual.⁴²

3. Prinsip Humanis dalam Pluralisme Masyarakat

³⁹ Abdurrahman Wahid, “Agama dan Demokrasi”, A. Gaffar Karim, *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 1995), hlm. 111.

⁴⁰ Umaruddin Masdar, *Membaca Pemikiran...*, hlm.147

⁴¹ Abdurrahman Wahid, *Prisma...*, hlm. 202

⁴² Abdurrahman Wahid, *Membangun...*, hlm. 115

Dalam proses demokratisasi ada sesuatu keharusan, yang tak boleh dilupakan dan diabaikan yaitu tentang kemanusiaan. Kemanusiaan ini tak dapat diabaikan karena hakekat dari demokrasi adalah menempatkan manusia sebagai subjek demokrasi itu sendiri. "...dari sekarang sebenarnya telah dituntut dari kita kesediaan bersama untuk memperjuangkan kebebasan dan menyempurnakan demokrasi yang hidup di negeri kita. Perjuangan itu haruslah dimulai kesediaan menumbuhkan moralitas baru dalam kehidupan bangsa dan negara dalam kehidupan bangsa, yaitu moralitas yang merasa terlibat dengan penderitaan rakyat di bawah."⁴³

Pandangan Abdurrahman Wahid tentang kemanusiaan ini muncul karena masih adanya konflik berkepanjangan yang terus terjadi hingga sekarang baik atas nama suku, ras, golongan maupun yang mengatasnamakan agama di berbagai pelosok di Indonesia. Konflik yang berkepanjangan ini menunjukkan belum adanya penghargaan terhadap kemanusiaan dan mudahnya orang main hakim sendiri. Dalam hal ini tokoh agama, birokrat, pendidik, tokoh masyarakat berperan terhadap penanaman nilai-nilai agama yang berkaitan dengan moralitas. Agama samawi yang terakhir (Islam) menurut Abdurrahman Wahid memuat lima jaminan kemanusiaan. Jaminan itu antara lain: keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum, jaminan atas keyakinan agama masing-masing, keselamatan keluarga dan keturunan, perlindungan harta benda dan milik pribadi.⁴⁴ Dari kelima jaminan dasar Islam terhadap kemanusiaan menunjukkan bahwa Islam memperlakukan warga masyarakat tanpa membedakan agama.

4. Prinsip Keadilan dan Egaliter

Demokrasi dikatakan berhasil jika warga masyarakat mendapatkan keadilan. Demokrasi terasa berkeadilan apabila ada kesetaraan (egalitarianisme) warga masyarakat baik di depan undang-undang, hukum maupun dalam lembaga birokrasi dengan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama tanpa adanya diskriminasi

⁴³ Abdurrahman Wahid, *Tuhan Tidak Perlu Dibela* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 190

⁴⁴ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara...*, hlm. 180

gender, warna kulit, pribumi-keturunan, etnis, idiologi, dan agama. “Jika dikaitkan dengan keadilan, demokrasi hanya dapat tegak dengan keadilan. Jika Islam menopang demokrasi, maka Islam juga harus menopang keadilan. Sebagaimana dalam Qur’an, *“wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian menegakkan keadilan”*.”

Perintah ini sangat jelas, yakni perlunya ditegakkan keadilan dalam segala bentuk, baik keadilan hukum maupun keadilan sosial. Keadilan sosial ini sangat penting karena salah satu patokan Islam adalah kaidah fiqh: *langkah dan kebijaksanaan para pemimpin mengenai rakyat yang mereka pimpin haruslah terkait sepenuhnya dengan kesejahteraan rakyat yang mereka pimpin itu*. Karena orientasinya adalah kesejahteraan rakyat, maka keadilan sangat dipentingkan. Orientasi kesejahteraan inilah yang membuktikan demokratis atau tidaknya kehidupan suatu masyarakat”.⁴⁵ Dari uraian di atas dapat tarik benang biru bahwa perbedaan agama, budaya, etnis harus dipahami dengan sikap yang bijak dan arif dari semua pihak tanpa mengunggulkan kelompok sendiri sembari merendahkan kelompok lain. Tiap kelompok masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dalam hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam membangun Indonesia. Dengan rasa solidaritas, keterbukaan, toleransi dan dialog kita membangun Indonesia yang berdudaya dan beradab, aman dan damai.

Kesimpulan

Indonesia adalah salah satu bangsa di dunia yang memiliki heteroginitas masyarakat baik dalam hal budaya dan lainnya, jika hal ini tidak dikelola dengan baik maka akan menjadi mala petaka yang dahsyat. Di satu sisi pluralitas masyarakat dapat menjadi kekuatan jika dikelola dengan baik dan profesional, namun jika tidak, perbedaan cara pandang antar individu bangsa yang plural menjadi faktor penyebab disintegrasi bangsa dan konflik yang berkepanjangan. Sikap yang tepat menurut Abdurrahman Wahid dalam menghadapi pluralitas masyarakat baik pluralitas agama maupun budaya serta

⁴⁵ Abdurrahman Wahid, *Membangun...*, hlm. 86

pluralitas etnik adalah menempatkan setiap kelompok masyarakat setara dengan kelompok lain dalam hal apapun tanpa ada diskriminasi dan ketidakadilan. Setiap warga masyarakat mempunyai kedudukan yang sama untuk berpendapat di muka umum, berkarya, beribadah, serta mendapatkan keadilan tanpa membedakan unsur agama, suku, jender, dan kewarganegaraan. Tiap kelompok masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dalam hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam membangun Indonesia. Dengan rasa solidaritas, keterbukaan, toleransi dan dialog kita membangun Indonesia yang berbudaya dan beradab, aman dan damai.

Menurut Abdurrahman Wahid nilai-nilai universal Islam lebih penting ketimbang formalisasi Islam yang hanya bersifat legalitas-simbolis, ia cenderung menutamakan substansi Islam karena dengan demikian nilai-nilai universal islam tidak hanya milik orang islam tapi juga milik non muslim seperti: demokrasi, keadilan, persamaan. Bagi Gus Dur sikap kritis harus tetap dilakukan guna memberikan masukan bagi perbaikan kehidupan. Ia tidak hanya menggunakan pemikiran Islam tradisional tetapi keilmuan keserjanaan Barat, keduanya saling melengkapi dalam rangka pemecahan masalah umat. Dengan demikian hukum Islam akan selalu dinamis dan dengan demikian tidak akan kehilangan relevansinya. Pendidikan merupakan institusi dan media paling efektif dalam mengelola keragaman tersebut. Fungsi pendidikan tidak lain merupakan upaya transformasi nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa. Upaya penanaman nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan harus diupayakan baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun lingkungan pendidikan.

Pendidikan Islam yang merupakan sub sistem pendidikan nasional mempunyai andil yang cukup besar dalam upaya transformasi nilai-nilai religiusitas kepada peserta didik, hal ini harus dimulai dari umat Islam, mengingat Islam sebagai agama mayoritas. Perubahan paradigma pendidikan Islam harus dilakukan. Hal ini dikarenakan paradigma yang selama ini dipakai ternyata lebih membentuk manusia yang egois, tertutup (eksklusif), intoleran, dan berorientasi pada kesalehan personal. Dalam menghadapi pluralitas masyarakat: multi etnik dan multi religi yang dibutuhkan adalah

paradigma pendidikan yang toleran, inklusif dan berorientasi pada kesalehan sosial dengan tidak melupakan kesalehan individual. Cara belajar pun harus dirubah dari metode ceramah menjadi problem solving, dari menghafal materi sebanyak-banyaknya menjadi penguasaan metodologi, dari mekanik menjadi organik, dari memandang ilmu sebagai hasil final menjadi memandang ilmu sebagai proses yang dinamis. Pendidik memandang anak didik sebagai pribadi otonom dengan segala potensi yang dimilikinya sehingga akan tercipta daya kreatifitas peserta didik. Dengan demikian demokratisasi pendidikan saat ini, dengan menempatkan kebijakan-kebijakan pendidikan yang berpihak pada nasib masyarakat di bawah. Dengan demikian pola penyeragaman dari atasan seharusnya berubah dengan pola yang mengedepankan kebutuhan rakyat (dalam hal ini siswa) di bawah. Materi pendidikan seharusnya mencakup nilai-nilai universal yang dimiliki agama diantaranya: nilai-nilai persamaan, keadilan, keterbukaan, kejujuran serta adab sopan santun.

Daftar Pustaka

- A. Gaffar Karim, *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 1995
- Abdurrahman an-Nahlawi, *Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam*, Bandung: Diponegoro, 1989
- Abdurrahman Wahid, *Islam di Tengah Pergulatan Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993
- _____, *Konsep Pendidikan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1984
- _____, *Membangun Demokrasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999
- _____, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, Yogyakarta: Desantara, 2001
- _____, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, Yogyakarta: LKiS, 1999
- _____, *Tuhan Tidak Perlu Dibela*, Yogyakarta: LKiS, 1999

- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999
- Ahmad Suaedy dan Ulil Abshar Abdalla, *Gila Gus Dur: Wacana Pembaca Abdurrahan Wahid*, Yogyakarta: LKiS, 2000
- Ahmad. D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, cet. 6, Bandung: Al Ma'arif, 1986
- Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1997
- Amin Abdullah, dkk, *Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multi Kultural*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2002
- Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* Yogyakarta: Kanisius, 1990
- Azumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milinium Baru*, Jakarta: Logos, 2002
- Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Al-Waah, 1989
- Endang Saifuddin Ashari, *Pokok-pokok Pikiran tentang Islam*, Jakarta: Usaha Enterprise, 1976
- Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, Yogyakarta: LKiS, 2003
- Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam*, Bandung: Al Ma'arif, 1980
- Kuncoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1989
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1991.
- Laode Ida dan A. Thantowi Jauhari, *Gus Dur diantara Keberhasilan dan Kenestapaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1999
- Listiono Santoso, *Teologi Politik Gus Dur*, Yogyakarta: Ar Ruuz, 2004
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 1996

- M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner* Jakarta: Bumi Aksara, 1994
- M. Naquib al-Attas, *Filsafat dan Praktik Pendidikan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1984
- Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989
- Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, 1999
- Moh. Ali, *Penelitian Pendidikan: Prosedur dan Strategi*, Bandung: Aksara, 1987
- Muh. Fadlil al-Jamil, *Filsafat Pendidikan dalam al-Qur'an*, Surabaya: Bina Ilmu, 1986
- Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya*, Bandung: Trigenda Karya, 1993
- Muhaimin dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, Surabaya: Karya Abditama, tt
- Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Indonesia*, Bamdung: Remaja Rosda Karya, 2001
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Ar Kolah, 1994
- Said Tuhelely, dkk, *Masa Depan Kemanusiaan*, Yogyakarta: Jendela, 2003
- Sudiarjo, *Dialog Intra Religious*, Yogyakarta: Kanisus, 1994
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Praktis*, Jakarta: Bina aksara, 1983
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yasbit, Fakultas Psikologi Universitas Gajahmada

- Th. Sumartana, dkk, *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Interfidie, 2001
- Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Yusuf al Qordlowi, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al Banna*, terj. Bustami A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad, Jakarta: Bulan Bintang, 1980
- Zainal Arifin Thoha, *Kenyelenehan Gus Dur Gugatan Kaum Muda NU dan Tantangan Kebudayaan*, Yogyakarta: Gama Media, 2001
- Zakiah Daradjat, *Ilmu pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996